

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas pelayanan publik yang baik mencerminkan adanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berpihak pada masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, pelayanan publik tidak hanya mencakup penyediaan layanan dasar, tetapi juga menunjukkan sejauh mana negara hadir dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar warga negara. Suranto, Hasyim, dan Abdurrahman (2024) menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat, dan lembaga perwakilan daerah seperti Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas layanan tersebut melalui fungsi representasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi daerah.

DPD RI merupakan lembaga negara hasil amandemen UUD 1945 yang dibentuk untuk memperkuat representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, fungsi dan kewenangan DPD RI diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 serta diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya. Dalam regulasi tersebut, DPD RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Fungsi tersebut

menjadi instrumen penting bagi DPD RI dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan di Aceh.

Pelaksanaan fungsi DPD RI di daerah masih menghadapi berbagai kendala. Rahman dan Izzatusholekha (2024) mengungkapkan bahwa pengelolaan aspirasi masyarakat oleh DPD RI masih belum optimal, terutama pada aspek responsivitas, koordinasi antarlembaga, dan tindak lanjut terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Akibatnya, berbagai persoalan pelayanan publik di daerah belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan nasional maupun program pembangunan yang konkret. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap peran DPD RI sebagai representasi daerah dengan realitas implementasinya di lapangan.

Provinsi Aceh, persoalan pelayanan publik pada bidang pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan yang cukup serius, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2024, masih terdapat ketimpangan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan antar kabupaten/kota di Aceh sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Perbandingan Kondisi Layanan Publik di Beberapa Kabupaten/Kota di Aceh (2024)

Indikator	Banda Aceh	Aceh Tengah	Aceh	Aceh Selatan	Rata-rata Provinsi Aceh	Keterangan
Rasio dokter per 100.000 penduduk	27 orang	14 orang	8 orang	11 orang	15 orang	Masih di bawah standar WHO (23/100.000) untuk sebagian daerah
Fasilitas kesehatan (RS/PKM)	8 RS, 30 Puskesmas	3 RS, 24 Puskesmas	2 RS, 34 Puskesmas	2 RS, 28 Puskesmas	23 RS, 285 Puskesmas	Distribusi tidak merata terutama di daerah pedalaman
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	96,8%	90,2%	83,2%	84,7%	91,4%	Ketimpangan akses pendidikan antarwilayah
Rasio Guru terhadap Murid SD	1:23	1:28	1:32	1:30	1:25	Kekurangan guru terutama di kecamatan terpencil
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,15	73,60	69,45	70,28	72,18	IPM tertinggi di Banda Aceh, terendah di wilayah utara dan Selatan

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2024)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan di Aceh masih belum merata. Pada sektor kesehatan, rasio dokter di beberapa daerah seperti Aceh dan Aceh Selatan masih berada di bawah rata-rata provinsi, bahkan sebagian belum memenuhi standar ideal pelayanan kesehatan. Distribusi fasilitas kesehatan juga masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Banda Aceh, sementara daerah pedalaman mengalami keterbatasan akses rumah sakit dan tenaga medis. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Kondisi pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan di Aceh juga dapat dilihat melalui beberapa indikator empiris yang menunjukkan masih adanya ketimpangan kualitas layanan antarwilayah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Data Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Aceh Tahun 2024

Indikator	Banda Aceh	Aceh Tengah	Aceh Utara	Aceh Selatan	Rata-rata Aceh
Rasio dokter per 100.000 penduduk	27	14	8	11	15
Jumlah Rumah Sakit	8	3	2	2	23
Jumlah Puskesmas	30	24	34	28	285
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	96,8%	90,2%	83,2%	84,7%	91,4%
Rasio guru SD terhadap murid	1:23	1:28	1:32	1:30	1:25
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,15	73,60	69,45	70,28	72,18

Persentase penduduk miskin	6,15%	14,21%	17,32%	15,84%	14,23%
Persentase stunting balita	18,1%	27,4%	31,2%	29,7%	29,4%
Angka putus sekolah SMP	0,32%	1,25%	2,11%	1,87%	1,43%

Sumber: BPS Provinsi Aceh Tahun 2024, Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2024, dan Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2024.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan di Aceh masih mengalami ketimpangan antarwilayah. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya rasio dokter, terbatasnya fasilitas kesehatan, rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta tingginya rasio guru terhadap murid di beberapa daerah. Selain itu, angka kemiskinan dan stunting yang masih cukup tinggi juga memengaruhi kualitas pelayanan dasar masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan di Aceh masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian berbagai pihak, termasuk DPD RI sebagai lembaga representasi daerah.

Permasalahan serupa juga terjadi pada sektor pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs di beberapa daerah masih relatif rendah dibandingkan daerah perkotaan. Selain itu, rasio guru terhadap murid menunjukkan masih adanya kekurangan tenaga pendidik, khususnya di kecamatan terpencil dan daerah tertinggal. Ketimpangan kualitas pendidikan ini berdampak pada rendahnya pemerataan sumber daya manusia dan turut memengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa wilayah Aceh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan di Aceh masih memerlukan perhatian serius dari berbagai

pihak, termasuk DPD RI sebagai lembaga representasi daerah di tingkat nasional. Secara normatif, DPD RI memiliki peran dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, peran DPD RI dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan di Aceh dinilai belum optimal. Perjuangan aspirasi masyarakat terkait pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas pendidikan, dan penguatan anggaran pelayanan dasar masih belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang signifikan di lapangan.

Selain itu, lemahnya koordinasi antara DPD RI dengan pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai persoalan pendidikan dan kesehatan di Aceh belum tertangani secara maksimal. Ilmiyah, Hamidi, dan Umam (2023) menjelaskan bahwa meskipun DPD RI telah memanfaatkan berbagai media komunikasi dan penyebaran informasi publik, pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan di daerah masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan substantif masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah terpencil.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara fungsi normatif DPD RI dengan realitas pelaksanaan perannya dalam memajukan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan di Aceh. Kesenjangan tersebut terlihat dari belum optimalnya pengawasan, koordinasi, serta advokasi kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat.

Meskipun berbagai persoalan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan di Aceh telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran DPD RI sebagai lembaga representasi daerah juga memiliki posisi strategis dalam mendorong penyelesaian berbagai permasalahan tersebut. Melalui fungsi pengawasan, penyerapan aspirasi, serta pemberian pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah, DPD RI diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan kegiatan DPD RI Perwakilan Aceh, berbagai aspirasi masyarakat terkait pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penanganan stunting, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil telah beberapa kali disampaikan melalui kegiatan reses, kunjungan kerja, dan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun demikian, berbagai indikator pelayanan publik menunjukkan bahwa permasalahan tersebut masih terus berlangsung. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran DPD RI dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh agar dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Di sisi lain, kewenangan DPD RI yang relatif terbatas dibandingkan DPR sering menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi representasi daerah. DPD RI hanya dapat memberikan usulan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan tanpa memiliki kewenangan pengambilan keputusan secara langsung terhadap alokasi anggaran maupun penetapan kebijakan nasional. Akibatnya, berbagai aspirasi daerah yang telah dihimpun tidak selalu dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang berdampak langsung kepada

masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap peran DPD RI dengan realitas pelaksanaan fungsi kelembagaan yang dimiliki.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk diteliti bagaimana peran DPD RI dalam memajukan layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan di Aceh, khususnya dalam menjalankan fungsi representasi, penyerapan aspirasi, pengawasan, serta advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan peran DPD RI sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat upaya peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan di Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana peran DPD RI dalam mendorong peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan dan pendidikan di Provinsi Aceh?
- 2 Apa saja faktor penghambat peran DPD RI dalam memajukan layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan di Aceh?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1 Peran DPD RI dalam mendorong peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan dan pendidikan di Provinsi Aceh.

2. Penghambat peran DPD RI dalam memajukan layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan di Aceh.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami dan mendeskripsikan Peran DPD RI dalam mendorong peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan dan pendidikan di Provinsi Aceh.
2. Penghambat peran DPD RI dalam memajukan layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan di Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi akademis dan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan peran lembaga perwakilan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik di tingkat daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi dalam melakukan penelitian lanjutan terkait peran DPD RI dalam memperkuat implementasi kebijakan publik di daerah. Selain itu, penelitian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akademis penulis atas keilmuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan pascasarjana kebijakan publik, sekaligus wujud

respons ilmiah terhadap dinamika penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi agenda penting pemerintah dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi DPD RI sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi daerah, dan pertimbangan kebijakan, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan di Aceh. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan DPD RI guna mendorong pemerataan pelayanan publik yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan perhatian terhadap kualitas pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih merata dan mudah diakses. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji peran lembaga perwakilan daerah dan pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik..